

PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNG BALAI

JALAN GAHARU NO. 3 NO. TELP. (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI Nomor: 421.5//768/PMK/2007

TENTANG

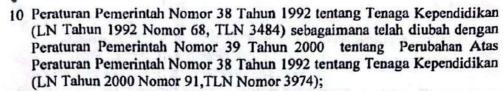
PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB - SMK NEGERI 4 KOTA TANJUNGBALAI

Menimbang

- bahwa dengan akan dibangunnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 pada Kota Tanjungbalai Tahun Ajaran 2007 / 2008.
- bahwa dalam rangka kegiatan Pendirian SMK perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 nomor 5, TLN Nomor 4355);
- 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
- 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
- 7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah (LN tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);



11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 14, TLN Nomor 4262);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575):

14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (LN Tahun 2007 Nomor 19, TLN Nomor 4693);

16 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi dan Standart

Kelulusan;

17 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Tanjungbalai

Tahun Anggaran 2007.

19 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Pembentukan Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4;

KEDUA

Tim Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU mempunyai peran:

- 1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perncanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.
- 2. Melaksanakan Pendiri Bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
- Melaksanakan rekruitmen tenaga pendidikan dan tenaga administrasi ;
- 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri :
- 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan;

: Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam dictum kedua akan dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tanjungbalai Pada tanggal : 6 Juni 2007

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Lean Kanjungbalai

Drs. M. Hamlet Sinambela, MPd

Pembina Tk.I

Nip. 13080569

ampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai.

Nomor

: 421.5 / 1788 /PMK/2007

Tanggal : 6 Juni 2007

Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU SMK Negeri 4 Kota Tanjungbalai

						6)				
10	9	00	7	6	5	4	ω	2	1	Z
Johan SPd	Dedi Ansari SPd	M.Fachri BA	Drs.H.Misli,S.MBa	Benawati S.Ag.I	Mislan SPd	Nahwati	Dra.Haslina	Sojuk Fachriani SPd	Drs.Darwin Rambe	NAMA
Guru	Guru	Guru	Pengawas	Guru	Gwru	Guru	Dinas	Guru / TU	Guru	UNSUR
Penjab Peralatan & Buku	Penjab Kur & Hub.DU/DI	Penjab Siswa	Penjab Guru	Penjab Kelembagaan	Ketua Unit Sarana Pendidikan	Ketua Unit Pendidikan	Bendahara	Sekretaris	Ketua Tim / Kepala Sekolah	JABATAN DALAM TIM USB - SMK

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Pembina Kil Niji 130805691 mambela,MPd

WALIKOTA TANJUNGBALAI

SURAT PERNYATAAN Nomor: 420/20810-

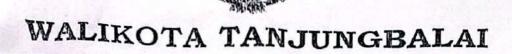
- enubungan dengan pelaksanaan pendirian USB SMK Tahun 2007, maka dengan ini kami tenyatakan:
 - Kesanggupan menyediakan dana pendamping minimal 1 : 1 pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
 - Kesanggupan menyediakan tanah seluas minimal 1,5 Ha.
 - Kesanggupan menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung
 - elancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) pada SMK.
 - Kesanggupan menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk kelangsungan SMK tersebut.
- panikian pernyataan kesanggupan pendirian gedung USB SMK Tahun 2007 ini diperbuat muk dapat dipergunakan seperlunya.

was perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tanjungbalai, Nopember 2006
Yang Menyatakan:

WALIKOTA TANJUNGBALAI

DE HI SUTRISNO HADI, Sp.OG.



SURAT PERNYATAAN

Lampiran

: 420/7942/DIK mud 12007.

Per hal

Kepada

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

ektorat Jenderal Manajemen Dikdasmen

Departemen Pendidikan Nasional

Di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan tentang Pendirian UNIT SEKOLAH BARU, dengan ini kami sampaikan bahwa Keta Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di Kelurahan Selat Tanjung Medan Ujung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Tanjungbalai dimaksud untuk menampung lelusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup dapat menampung lujusan tersebut,

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor :4380/C.C3/KU/ tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Dana Subsidi Block Grant dan Imbal Swadaya, dan berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana imbal Pendirian USB SMK dari Pemerintah Pusat, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Kami akan menyediakan dana pendamping (sharing) yang besarnya sesuai dengan yang

tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Pelaksanaan Pembangunan USB SMK Negeri 4 khusunya, dana dari Pemerintah Pusat akan dilakukan dengan cara Swakelola dan melibatkan partispasi masyarakat sesuai dengan ketentuan

Apabila pelaksanaan butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan pernyataan ini, bantuan dana dari

Pemerintah Pusat untuk tahap-tahap selanjutnya agar tidak dicairkan.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungbalai, 6 JUNI TALIKOTA TANJUNGBALAI

ADI, Sp.OG

Tembusan

Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta

2 Ketua DPRD Kota Tanjungbalai